

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2022). Strategi pemerintah kota dalam menata PKL di kawasan perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134–142.
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (2024). Laporan tahunan penataan dan pembinaan PKL di Kota Semarang tahun 2024. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Gunawan, A. (2021). Peran Satpol PP dalam menegakkan perda tentang ketertiban umum. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 55–68.
- Hadi, S. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda dan Ketertiban Umum. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayati, S. (2020). Implementasi pendekatan humanis dalam penertiban PKL oleh Satpol PP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*, 7(1), 88–96.
- Kurniawan, D. (2018). Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat: Teori dan Praktik di Lapangan. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, S. (2018). Konflik PKL dan Satpol PP: Kajian Sosial dan Kebijakan Publik. Bandung: Humaniora Press.
- Maulana, R. (2017). Fungsi Satpol PP dalam Perspektif Otonomi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhadi, A. (2020). Implementasi Perda dan Peran Strategis Satpol PP. Semarang: Cipta Ilmu Press.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000–2010.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Relokasi Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 511.3/16 Tahun 2001 tentang Penetapan Lahan/Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Putra, B. (2022). Satpol PP dan Ketertiban Perkotaan: Studi Kasus di Kota-Kota Besar Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
- Ramadhani, I. (2020). Pendekatan Humanis Satpol PP dalam Menangani PKL. Surabaya: Pustaka Masyarakat Madani.
- Rizki, F., & Lestari, N. (2023). Studi evaluasi kinerja Satpol PP dalam menangani PKL di kawasan perkotaan. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 11(2), 77–86.
- Setiawan, D. (2021). Satpol PP: Penegak Ketertiban dalam Bingkai Demokrasi. Jakarta: Penerbit Obor Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Widiyanto, T. (2016). Kebijakan Publik dan Penegakan Ketertiban oleh Satpol PP. Yogyakarta: Ombak.
- Yusuf, H. (2021). Penataan Ruang Kota dan Satpol PP: Antara Penegakan dan Perlindungan. Jakarta: Bina Aksara.